

ABSTRAK

Pengelolaan pendidikan di negara Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan menteri yang salah satunya mengatur tentang penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi. ketentuan mengenai sistem zonasi tersebut bertentangan dengan hak memilih satuan pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Undang – undang sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan serta menggunakan analisis bahan hukum deduksi dan metode penafsiran hukum gramatikal atau bahasa. Analisis dilakukan dengan peraturan perundang – undangan terkait dengan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan jalur zonasi dan mengambil kesimpulan setelahnya. Penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi mengalami banyak permasalahan setiap tahunnya hingga dapat dikatakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang tentunya tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan yakni asas dapat dilaksanakan. kemudian sistem zonasi tersebut membatasi dan mengurangi hak orang tua dari calon peserta didik dalam memilih satuan pendidikan sehingga bertentangan dengan undang – undang sistem pendidikan nasional yang menjamin hak untuk memilih satuan pendidikan.

Kata kunci : Pendidikan, sistem zonasi, konflik norma, memilih satuan pendidikan.

ABSTRACT

The management of education in Indonesia country is the responsibility of the government, in this case the Minister of Education and Culture. In organizing education management, the Minister of Education and Culture issued a ministerial regulation, one of which regulates the admission of new students using the zoning system. The provisions regarding the zoning system conflict with the policy to choose an education unit as regulated by the national education system law. This research uses Normative research by using the statutory approach and using deduction legal analysis and grammatical or language interpretation methods. The analysis was carried out with the laws and regulations related to the acceptance of new students by using zoning and drawing conclusions afterwards. Acceptance of new students using the zoning system experiences many problems each year until it can be said to be unable to be implemented properly which is certainly not in accordance with the principles of the formation of laws and regulations namely the principle can be implemented. Then, the zoning system limits and reduces the rights of parents of prospective students to choose education units so that they conflict with national education system laws that guarantee the policy to choose education units.

Keywords: Education, zoning system, conflicting norms, choosing education units.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Kegunaan penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Hak Warga negara di Bidang Pendidikan.....	17
2.2 Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan di Indonesia.....	18
2.2.1 Penerimaan Peserta Didik Baru.....	18
2.2.2 Sistem Zonasi.....	20
2.3 Hierarki Peraturan Perundang – undangan.....	21
2.3.1 Peraturan Perundang – Undangan.....	21
2.3.2 Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang – Undangan.....	22
2.3.3 Asas – Asas Hukum dalam Peraturan Perundang – Undangan.....	31

2.3.4	Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang baik.....	33
2.4	Negara Hukum.....	37
BAB III KONSEP PENGATURAN ZONASI DAN HAK MEMILIH SATUAN PENDIDIKAN.....		41
3.1	Konsep Pengaturan Zonasi.....	41
3.1.1	Pengaturan sistem zonasi dalam Hierarki Perundang – undangan.....	41
3.1.2	Konsep Pengaturan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia.....	52
3.2	Hak Peserta Didik Baru dalam Memilih Satuan Pendidikan.....	64
BAB IV PENUTUP.....		72
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
BIODATA PENULIS.....		78